

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kriminologi

A.1. Definisi Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau jahat, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya:

W. A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹¹ Paul Mudigdo Moeliono menyatakan bahwa tidak sependapat dengan yang dikemukakan Sutherland dan dia memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. Kriminologi. PT Grafindo. Jakarta. Hal 10

Michaeli dan Adler mendefinisikan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹²

¹² *Ibid* Hal. 12

A.2. Objek Kriminologi

Jadi secara keseluruhan dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para sarjana tersebut diatas bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan:
- b. Pelaku kejahatan: dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³

A.3. Teori-teori Kriminologi

Kriminologi mengenal banyak sekali teori-teori, akan tetapi kita coba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi ke dalam tiga perspektif:

- a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Teori ini menitikberatkan pada perbedaan-perbedaan kondisi fisik dan mental yang terdapat pada individu. Dengan mempertirnbangkan suatu variasi kemungkinan, antara lain yaitu; cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral lemah, pengaruh hormon, ketidak normalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku Para tokoh teori ini; Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring.¹⁴

¹³ Rahmat. 2012. Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Indonesia studi kasus universitas negeri Gorontalo). Hal. 16

¹⁴ *Ibid.* Hal 17

b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis

Teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka kejahatan di dalam suatu lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu; strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control (kontrol sosial). Berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

c. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternative penjelasan terhadap Kejahatan yang sangat berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai tradisional explanations. Para kriminolog menjelaskan kejahatan dengan berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal tetapi lebih karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

A.4. Pemikiran Kriminologi Baru (kritis)

Sedangkan aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak belakang pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan

otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*socialinjuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Robert F. Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik

berupa sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.¹⁵

Suatu catatan kritis terhadap pemikiran ini, diungkapkan oleh Paul Mudigdo Moeliono. Dinyatakan bahwa kadar kebenaran dan nilai-nilai praktis dari teori kritis dapat bertambah apabila hal itu dikembangkan dalam situasi konkret demi kepentingan atau bersanta-sarna mereka yang diterbelakangkan, guna memperbaiki sistem hukurn atau pengurangan keterbelakangart tnereka dalam masyarakat. Akan tetapi, bahaya dari praktek pengalaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya generalisasi yang terlalu jauh jangkauannya. Mereka sanwai pada perumusan-perumusan tentang kejahatan dan perilaku penyimpangan yang tidak dapat dipertahankan oleh karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik adalah pernyataan dari perlawanan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tidak adil yang hendak menyamaratakan orang-orang rnenjadi obyek-obyek peraturan oleh birokrasi dan politik. Jock Young (1975) mengenalkan suatu term baru "kriminologi kelas pekerja" (*The workirtg criminology*) dengan mengatakan strategi radikal kriminologis bukanlah mendukung legalitas dan *rule of law*, rnelainkan membuka kedok hukum dalam warna yang sesungguhnya, sebagai alat dari kelas yang berkuasa, dan secara taktis menunjukkan bahwa negara akan melanggar Undang-undangnya sendiri, bahwa legitimasinya

¹⁵ *Ibid.* Hal. 18

adalah sebuah dalih belaka, serta pembuat aturan adalah juga sekaligus pelanggar hukum yang paling utama.

Pada intinya bahwa Kriminologi bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang: kejahatan dan pencegahan atau perlakuan.¹⁶

Menurut Sutherland¹⁷ merumuskan: "*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*"; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu: sosiologi hukum, yaitu ilmu tentang perkembangan hukum, Etiologi hukum yaitu yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, penologi yaitu yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Secara luas kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana peneegahan kejahatan dilakukan termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

¹⁶ *Ibid.* Hal 19

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2010. Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama. hlm.xviii.

Pertama: sosiologi hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari yang terkait dengan kondisi tertentu hukum pidana peranan hukum.

dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

Kedua: etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya.

Ketiga: penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan *"control of crime"*.

Keempat: viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.¹⁸ Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi telah berkembang semenjak tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti

¹⁸ *Ibid*

ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu I pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali di gunakan oleh P. Topinand (1879), ahli antropologi perancis.¹⁹ Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi perancis secara harfiah menyatakan. berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti Kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi. Bonger Memberikan definisi Kriminologi "sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan gejala kejahatan seluas-luasnya."²⁰ Disamping itu Bonger juga Membagi Menjadi Kriminologi Terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan;
2. Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan dimana satu kejahatan terjadi. disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan masyarakatnya;
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan;

Pengertian Kriminologi Menurut Sutherland Merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social yang mencakup proses-proses

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2007 ,Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi, Bandung. Adi Tama. Hal 4

²⁰ Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 10

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Sosiologi hukum ilmu tentang perkembangan hukum;
- b. Etiologi hukum yang mencoba melakukan analisa mengenai sebab-sebab kejahatan;
- c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan nara pidana; Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari sipelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut, karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi Kriminologi adalah: "Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia".²¹

Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang

²¹ *Ibid.* Hal 12

bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan jahat itu.

Wolfgang Savitz dan Johnston dalam memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²²

Bertolak dari pemikiran yang di sampaikan para pakar kriminologi diatas maka calon peneliti berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perbuatan jahat menyangkut orang-orang yang terlibat dalam suatu tindakan yang melanggar norma hukum yang dapat di kategorikan kedalam unsur-unsur pidana.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil studi dibidang etiologi dan penologi dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalitas) atau pencabutan undang-

²² *Ibid.*

undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”. Bahkan aliran modern yang diorgasasikan oleh von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantu agar bersama-sama menentang hasil penyelidikan kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jika terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjukkan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat. Terhadap kriminalisasi, H. Manneheim memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan:

1. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat;
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya;
3. Perlu diingat pula apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan obyek hukum

pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu.

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri. Pembagian kriminologi menurut Bonger yaitu: a.

- a. Antropologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, misalnya didalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa;
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat:
- c. Psychology kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;

- d. Psycho dan neuro kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- e. Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukuman.²³

B. Tinjauan Teoritis Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Kejahatan anak sering disebut dengan “juvenile delinquency” atau yang biasa diartikan sebagai kejahatan remaja dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agarna. dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku masyarakat. Dalam Wikipedia orang yang merupakan situs ensiklopedia bebas, istilah remaja dapat diartikan sebagai waktu manusia berumur belasan tahun,, dimana pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun.²⁴

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi

²³ Wahyu Muijono. 2012. Pengantar Teori kriminologi. Yogyakarta. Pustaka Yudistia. Hal 31

²⁴ Remaja, <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 24 Mei 2017

"Anak Nakal" adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami kegoncangan pada masa menjelang kedewasaan, dimana tindakan-tindakannya merupakan manifestasi dari kepubertas remaja. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa perubahan menjelang kedewasaan itu dapat dilewati dengan baik tanpa terjadi tindakantindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal.

C. Tinjauan Yuridis Tentang Batas Umur Anak

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan²⁵, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁶

²⁵ Lihat di penjelasan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lihat

²⁶ Lihat di penjelasan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan dengan menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari ciri-ciri tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum menunjukkan tanda-tanda yang oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Pembatasan anak dari segi umumnya tidaklah selamanya tepat karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuannya masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana mengemukakan bahwa:

Amerika Serikat batas umur anak 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas tahun). Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun,

di Inggris baras umur anak 12 tahun dan maksirnal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sarnpai 18 tahun, demikian juga di Srilangka. Jepang, Korea, Filipina. Malaysia dan Singapura.²⁷

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undanon yang mengatur tentang anak, misainya:

1. Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 mertunuskan sebagai berikut Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.²⁸
2. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum rnencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹
3. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang

²⁷ Hamid. Suryana, 2004, Hak Asasi Manusia Dalam Sistern Peradilan Pidana, Jakarta: PPPKPH-UI. Hal 21

²⁸ Lihat di penjelasan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁹ Lihat di penjelasan pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Norner 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.³⁰

4. Dalam Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹
5. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengemukakan bahwa : Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum berumur genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.³²

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Hal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.

D. Teori Upaya Penanggulangan Dalam Kriminologi

³⁰ Lihat di penjelasan pasal I Butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Lihat di penjelasan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pertindungan Anak

³² Lihat di penjelasan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D.1. Pengendalian yang bersifat langsung

Pengendalian yang bersifat langsung menurut di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni:³³

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, men-tasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal penjaga pada obyek kriminalitas.
3. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
6. Penghapusan peraturan yang meiarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

D.2. Pengendalian yang bersifat tidak langsung

Pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi:³⁴

³³ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah. 1993. Polisi Petakit dan Jakarta. Penerbit Gratnedia

³⁴ *Ibid*

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta rniik sendiri dan orang tain, melapor pada ya.ng berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. Penimbunan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.

D.3. Pengendalian melalui perbaikan perilaku

Menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah adapun tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut: ³⁵

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban krisminalitas, rnengenai usahausaha pencegahan,
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.
7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.

³⁵ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah. 1993. Polisi Pelaku dan Pemikir. Jakarta. Penerbit gramedia. Hal 20

D.4. Pengendatian kearnanan dan ketertiban

Pengendatian kearnanan dan ketertiban rnasyarakat sebelumn terjadinya tindak krirninalitas seianjutnya adalah dengan rnenjuniskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan angka kriminalitasikorban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.³⁶

D.5. Pencegahan tindak kriminalitas

Pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku, dapat ditakukan sebagai berikut:

1. Penelitian lingkunganiperilaku dalarn pengawasan tindakan perilaku kriminil untuk dalarn hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkart penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.

³⁶ *Ibid.*

2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk Ineneari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada tununinya.

E. Tinjauan Yuridis Tentang Minuman Beralkohol dan Jenis-jenisnya

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 tentang minuman keras yakni :³⁷

Dijelaskan bahwa Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan:

Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara membetikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.³⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman

³⁷ Lihat dipenjelasan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 tentang minuman keras

³⁸ Lihat di penjelasan. pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol

tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Jenis dan Standart Mutu minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).³⁹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan bila diminum misainya, Beer, Anggur, dan sebagainya fflintunan yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-widang Hukum Pidana (KUIIP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang

³⁹ Lihat di penjeiasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minurnan Beralkohol

mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.⁴⁰

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Alkohol yang dikenal sehari-hari yang terdapat dalam minuman adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH , etanol adalah jenis alkohol yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri. Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (gula). Bahan baku yang digunakan beragam seperti bijibijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman palma dan limbah hasil pertanian. Industri etanol telah dikenal cukup lama dan diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan proses fermentasi atau dengan cara sintesis.

⁴⁰ Lihat di penjelasan pasal 537 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira, dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86 / 1977).
2. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.
3. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.
4. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
5. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil ataupun keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras
Minuman Iteraikohot dapat dikemukakan sebagai berikut

1. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nornor 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nornor 86 / Menkes Per / IV / 77 tentang minuman keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nornor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Adapun uraian dari ketentuan di atas adalah :

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 861Men-Kes/Per/IV/77 tentang minuman beralkohol.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa: Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol ditarang

menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat, Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan utang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol setiap Negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio cultural, kekuatan ekonomi, pola religious, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di setiap Negara. Penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah kesehatan yang cukup serius, sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (rhabuk) bagi peminumnya

bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu mirtuman beralkohol justru mengalami peningkatan, bagi banyak kalangan meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap sebagai sarana kegagahan atau unjuk kejantanan tanpa mereka tahu dampak bagi kesehatan yang akan mereka dapatkan dikemudian hari, alkohol juga dapat mengakibatkan kurangnya produktifitas dalam melakukan pekerjaan.

Penyimpangan perilaku negatif yaitu kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol (Miras) secara berlebihan hingga mabuk, yang pada akhirnya tidak jarang menjadi pemicu lahirnya pelanggaran atau bahkan tindakan pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, pencurian bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga adalah dilatar belakangi atau diawali dengan mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut ahli Kesehatan, faktor penyalahgunaan minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama tentang respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri, yaitu :⁴¹

1. Gangguan penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu seseorang (remaja), sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya,

⁴¹ alkoholisme-dan-penyalahgunaan-alkohol <http://gosehat.com/> diakses tanggal 30 Mei 2017

remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga disebut taraf coba-coba, termasuk mencoba minuman beralkohol.

2. Gangguan pengguna alkohol bersifat rekreasional Pengguna alkohol pada waktu berkumpul bersama teman-teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malarn minggu, ulang tahun. atau acara pesta lainnya. Pengguna ini mempunyai rekreasi bersama teman-ternan sebayanya.
3. Gangguan pengguna alkohol yang bersifat situasional. Seseorang rnengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual. Hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali pengguna ini merupakan cara untuk melarikart diri dari masalah, konflik, strees dan frustasi.
4. Gangguan penggtma alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkpohol yang sudah patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama I (satu) bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku,mengganggu ftnngsi dalam peran dilingkungan sosial, seperti dilingkungan pendidikan atau pekerjaan.

Pengguna alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologi. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindrorna putus zat (alkohol), sesuatu kondisi dimana individu yang biasa menggunakan zat adiktif (aicohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai,

sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan macam zat yang digunakan.

Respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut diatas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial.

Perilaku agresif, emosional, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol. Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap ini. Kebut-kebutan dijaian, pesta pora, aktifitas seksual, perkelahian dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh sekelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini.

Minuman beralkohol seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Dampak ketagihan akibat minuman alkohol tidak tergantung pada jenis alkohol tetapi jumlah yang diminum pada saat itu. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya kondisi seperti tidak dapat berjalan dengan benar dan tidak dapat membuka pintu. Dalam waktu

yang singkat ini juga menyebabkan hangover. Hangover lazimnya disebabkan oleh keracunan alkohol, bahan lain dalam alkohol dan akibat ketagihan alkohol. Tanda-tanda hangover adalah sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus dan menggeletar selama 8-12 jam kemudian. Dampak jangka panjang akan dirasakan setelah meminum selama beberapa bulan atau tahun.

Dampak utama dari seringnya mengonsumsi minuman beralkohol adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini terjadi mereka akan mengalami kurangnya selera makan, kekurangan vitamin, mudah terjangkit penyakit, impotensi. Konsekuensi awal sering terjadi akibat sering minum alkohol. Biasanya terjadi serangan sakit jantung hati, radang paru-paru, kanker. keracunan alkohol, kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri.

Pada peminum-peminum berat yang sulit disembuhkan akan timbul gejala-gejala sebagai berikut :

1. Gangguan kesehatan fisik, Minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman beralkohol, dapat terjadi pengerasan hati (*Cirrhosis hepatitis*), peradangan lambung (*Gastritis*) dan tukak lambung (*Ulcus verariculi*).
2. Gangguan kesehatan jiwa, Minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah yang berlebihan menimbulkan kerusakan permanen pada

jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan daya penilaian, kemampuan dan gangguan jiwa tertentu.

3. Gangguan fungsi sosial atau pekerjaan.

Akibat meminum minuman beralkohol, dalam perasaan seseorang akan berubah, orang menjadi tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu, Hilangnya daya ingat dan terganggunya kemampuan untuk menilai sesuai judgement (mengakibatkan yang bersangkutan terpaksa tidak melakukan pekerjaan sehingga dikeluarkan dari pekerjaan. Ada juga yang mengatakan 10 % dari peminum kronis akan menderita Cirrhosis. Sebab kematian yang terpenting pada para peminum kronis adalah terjadinya kegagalan hati (*Liver Failure*) dan terjadinya *Rupture Varises Esofagus* sebagai akibat hipertensi portal. Dari sisi akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali :

1. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Keamanan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang diawali disertai, bahkan diakhiri oleh pengguna minuman beralkohol.
3. Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah

4. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

